KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

SUMBANGAN
DOMPET KR "COVID-19"
REKENING BCA
NO. : 126.556.5656
A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT
NB : SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2296.0972

KAMIS LEGI | 22 OKTOBER 2020 (5 MULUD 1954 / TAHUN LXXVI NO 26) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

DIPRODUKSI UMKM

27 Juta Masker Kain Didistribusikan

JAKARTA (KR) - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Kesehatan melibatkan sembilan agregator UMKM untuk memproduksi 27 juta potong masker kain senilai Rp 150 miliar, yang akan didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Langkah itu merupakan komitmen bersama untuk penyelamatan sektor UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Kesembilan agregator UMKM yang mengerjakan pesanan masker itu merupakan pelaku usaha yang melibatkan UMK binaan dalam proses produksinya, dan melakukan quality control terhadap produk yang dihasilkan oleh UMK binaannya. Tujuan menggunakan agregator ini, untuk memudahkan pengadaan, sekaligus mendorong usaha kecil agar tidak berdiri sendiri, melainkan membangun usaha kolektif dalam skala khusus.

"Ini embrio yang bagus. Biasanya kalau ada agregatornya, ke depannya bisa menjadi off taker untuk produk mereka, sehingga pembiayaan bisa lebih mudah diakses oleh usaha mikro dan kecil, termasuk untuk pengembangan produk," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Rabu (21/10).

Teten Masduki mengatakan, Kemenkop UKM melakukan inisiasi bersama Kemenkes dalam pengadaan masker yang diproduksi oleh UMKM. Program ini diharapkan mampu membangkitkan kembali usaha UMKM yang terdampak, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker kain, karena masker kain diklaim cukup efektif untuk menghambat penyebaran virus Covid-19.

*** Bersambung hal 7 kol 6**

KR-Franz Boedisoekarnanto

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi sejumlah pejabat Pemda DIY berjalan di depan Hotel Mutiara Malioboro, Yogyakarta, Rabu (21/10).

Renovasi Mulai 2021, Bakal Dijadikan Sentra UMKM

Pemda DIY Beli Hotel Mutiara Rp 170 M

YOGYA (KR) - Pemda DIY secara resmi telah membeli dua bangunan Hotel Mutiara yang terletak di sebelah Barat kompleks Pemda DIY, Kepatihan, kawasan Malioboro. Dua bangunan yang usianya sudah lebih dari 40 tahun tersebut dibeli Pemda DIY dari pemiliknya langsung Umar Santoso pada September 2020 dengan harga Rp 170 miliar, menggunakan alokasi Danais 2020 karena hotel tersebut berada di kawasan Sumbu Filosofis.

Bangunan Hotel Mutiara yang berada di sebelah Utara akan difungsikan sebagai Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang renovasinya akan mulai dilakukan pada 2021 mendatang.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

RESESI sudah di depan mata. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, resesi ekonomi harus dihadapi bersama, baik pemerintah pusat juga daerah. Terkait ini alokasi dana pemulihan ekonomi nasional - PEN sampai akhir September Rp 304,6 triliun atau 43,8% dari pagu Rp 695,2 triliun. Realisasi per26 Agustus 2020 baru 28%. Dana PEN tahun 2021 Rp 356,5 triliun dengan rincian penanganan kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah Rp 110,2 triliun. Kemudian kementerian/lembaga - pemda Rp 136,7 triliun dan UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Jawa Tengah - DIY sepertinya tidak bisa mengelak dari kondisi ini. Sejak pandemi Maret 2020, semua upaya ditempuh untuk dapat menyelamatkan perekonomian daerah. Setidaknya, terlihat dari komitmen OJK Regional 3 bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah dan DIY terus melakukan koordinasi demi penyelamatan perekonomian.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT — Kamis, 22 Oktober 2020

Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
11:27	14:34	17:36	18:46	03:57

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

CEGAH PENINGKATAN KASUS COVID-19

Libur Panjang, DIY Perketat Prokes

YOGYA (KR) - Untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 dan munculnya klaster baru pada saat libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober hingga awal November 2020 nanti, Pemda DIY akan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19.

"Saya minta Satpol PP untuk tegas menindak para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 termasuk pada saat libur panjang. Karena diprediksi akan banyak wisatawan yang datang ke DIY sehingga berpotensi meningkatkan kasus Covid-19. Padahal tidak semua warga memiliki kesadaran untuk mematuhi prokes, termasuk para wisatawan. Karenanya penegakan prokes harus dilakukan

*** Bersambung hal 8 kol 5**

MUHAMMADIYAH BERTEMU PRESIDEN

Usulkan UU Ciptaker Ditunda

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Perpu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja (Ciptaker). Presiden Jokowi menyampaikan hal itu ketika bertemu pengurus PP Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (21/10).

"Komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Ciptaker memang kurang dan perlu diperbaiki," demikian ujar Presiden seperti dituturkan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir usai pertemuan dengan Jokowi.

Pada pertemuan Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi itu, hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir didampingi Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti dan Dr Sutrisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM). Sedangkan, Presiden didampingi Mensesneg Prof Pratikno dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi, seperti dikutip Haidar, menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan soalnya banyaknya kritik dari masyarakat.

Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perpu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari banyak pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Ciptaker yang bermasalah.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ini para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972.**

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT		RUPIAH
684	Loen			10,282.00
	JUMLAH		**Rp**	**10,282.00**
	Melalui Transfer			
685	Demiawan Yunanto			50,000.00
686	Octaawan Yunanto			50,000.00
687	Hamba Allah			49,718.00
	JUMLAH		**Rp**	**149,718.00**
	JUMLAH		**Rp**	**160,000.00**
	s/d 20 Oktober 2020		Rp	371,350,000.00
	s/d 21 Oktober 2020		**Rp**	**371,510,000.00**

(Tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Siapa menyusul?

IMUNISASI AKAN DIMULAI NOVEMBER

DIY Bakal Dapat 2,29 Juta Vaksin Covid-19

JAKARTA (KR) - Pelaksanaan imunisasi Covid-19 dilakukan secara bertahap. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Penyakit telah menginformasikan rencana pelaksanaan vaksinasi tersebut kepada setiap kepala dinas terkait setiap provinsi, termasuk di antaranya estimasi jumlah vaksin yang akan diterima. Sedangkan DIY, diestimasi bakal mendapatkan jatah vaksin 2,29 juta vaksin Covid-19.

Dirjen Pencegahan dan Pencegahan Penyakit, dr Achmad Jurianto dalam surat edaran kesetiap dinas, yang diterima redaksi *KR*, Rabu (21/10) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemberian imunisasi Covid-19 secara bertahap mulai November 2020. Imunisasi Covid-19 diberikan pada kelompok rentan usia 18-59 tahun yang terdiri berbagai kelompok. Pertama, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan kebijakan operasional imunisasi Covid-19, yaitu (A) Petugas pelayanan publik yaitu petugas yang berhadapan langsung dengan masyarkat, misalnya TNI, Polri, petugas bandara, petugas stasiun kereta api, petugas pelabuhan, pemadam kebakaran, petugas PLN dan PAM yang bertugas di lapangan, dan lainnya.

(B) Kelompok risiko tinggi lainnya, yaitu kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian

*** Bersambung hal 8 kol 5**

Estimasi Sasaran Pemberian Vaksin Covid-19 Perprovinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Tenaga Kesehatan dan Petugas Pendukung lainnya yang bekerja di Puskesmas			Anggota BPJS PBI	Petugas Pelayanan Publik				Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Lainnya	Total Sasaran
	Sipil	TNI	Polri		Satpol PP	TNI	Polri	Lainnya		
Jakarta	167.069	466	875	3.556.071	4.835	59.027	49.798	538.248	2.370.299	6.746.688
Jawa Barat	22.698	1.843	838	16.733.312	5.537	59.232	30.474	2.680.577	11.878.010	31.390.519
Jawa Tengah	22.947	1.358	965	11.747.366	4.788	27.294	33.741	1.885.026	7.529.262	21.252.747
DI Yogyakarta	16.538	97	117	1.295.630	780	6.400	9.785	198.238	770.822	2.298.407
Jawa Timur	22.767	1.067	1090	9.324.128	6.019	103.378	38.419	1.400.300	8.826.301	19.723.469
Banten	5.060	485	134	4.376.316	1.789	8.179	7.121	709.920	2.955.579	8.104.581

Sumber : Kemenkes RI — Grafis : Arko

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● SEBELUM pandemi Covid-19, aku dan adikku kongkow di kafe. Sambil menunggu salah seorang teman, adik membuka Alquran dan membacanya. Seorang bapak melewati meja kami seraya bertanya kepadaku, "Berapa juz hafalan Alquran, Adik?" Ketika kusebutkan jumlah juz yang dihafal adik, beliau menyerahkan uang seratus ribu rupiah. Masya Allah. (Karunia Sylviany Sambas, RSUD Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Jalan Mayjend Sutoyo 39 Tanjungbalai Sumatera Utara)-d